



PENETAPAN KINERJA (PKT) TAHUN 2019 PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS I B



2019



Jln. Asahan Km. 4 Siantar, Kab. Simalungun.
Website: www.pn-simalungun.go.id

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **JON SARMAN SARAGIH, SH., M.Hum.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Dr. H. CICUT SUTJARSO, S.H., M.HUM**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simalungun, 07 Januari 2019

Pihak Kedua

Pihak Pertama

-DTO-

Dr. H. CICUT SUTJARSO, S.H., M.HUM
NIP. 195507221980031001

JON SARMAN SARAGIH, S.H., M.HUM.
NIP. 19650307 199212 1 001 15

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ESRON GINTING, S.H..**

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **JON SARMAN SARAGIH, S.H.,M.HUM.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simalungun, 07 Januari 2019

Pihak Kedua

JON SARMAN SARAGIH, S.H.,M.HUM.
NIP. 19650307 199212 1 001 15

Pihak Pertama

ESRON GINTING, S.H..
NIP. 19700125 199303 1 007

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **PARULIAN HASIBUAN, S.H.**

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Simalungun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **JON SARMAN SARAGIH, S.H.,M.HUM.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simalungun, 07 Januari 2019

Pihak Kedua

Pihak Pertama

JON SARMAN SARAGIH, S.H.,M.HUM.
NIP. 19650307 199212 1 001 15

PARULIAN HASIBUAN, S.H.
NIP. 19630226 198412 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS I B

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	
		- Perdata	100 %
		- Pidana	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :	
		- Perdata	90 %
		- Pidana	90 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara :	
		- Perdata	20 %
		- Pidana	20 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	
		- Banding	90 %
		- Kasasi	90 %
		- PK	90 %
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.	2 %
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	100 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	2 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang	100 %

		dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	0 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70 %

Program / Kegiatan

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Anggaran

1. 4.599.270.000,-
2. 13.000.000,-
3. 420.800.000,-

Simalungun, 07 Januari 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



ION SARMAN SARAGIH, S.H., M.Hum
NIP. 19650307 199212 1 001 15



PARULIAN HASIBUAN, SH.
NIP. 196302261984121001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS I B

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	g. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	
		~ Perdata	100 %
		~ Pidana	100%
		h. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :	
		~ Perdata	90 %
		~ Pidana	90 %
		i. Persentase penurunan sisa perkara :	
		~ Perdata	20 %
		~ Pidana	20 %
		j. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	
		~ Banding	90 %
		~ Kasasi	90 %
		~ PK	90 %
		k. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.	2 %
		l. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	100 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	e. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		f. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	2 %

		g. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100 %
		h. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	100 %
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		e. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	0 %
		f. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	b. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70 %

Program / Kegiatan

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Anggaran

1. 4.599.270.000,-
2. 13.000.000,-
3. 420.800.000,-

Simalungun, 07 Januari 2019

Pihak Kedua



JON SARMAN SARAGIH, S.H., M.HUM.
NIP. 19650307 199212 1 001 15

Pihak Pertama



ESRON GINTING, S.H.
NIP. 19700125 199303 1 007